

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI ORANG YANG BERBEDA AGAMA



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Diajukan Oleh :

HELLYNA RATNA SARI
C.100.040.119

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dunia ini tidak sendirian, akan tetapi bersama-sama dan saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena manusia yang satu dengan manusia yang lain. Karena kebutuhan untuk hidup bersama inilah maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa berhubungan antara satu dengan yang lain dan hidup bersama serta berorganisasi dan akhirnya membentuk suatu masyarakat.

Bagian yang terkecil dan yang pertama kali digunakan manusia sebagai sarana untuk bergaul dan hidup bersama adalah keluarga. Bermula dari keluarga inilah kemudian manusia mengembangkan pergaulannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang bermasyarakat, manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan sebagai makhluk yang paling sempurna manusia dikaruniai hati nurani dan akal untuk berpikir sebagai upaya untuk memenuhi eksistensinya sebagai makhluk sosial. Di dalam memenuhi kebutuhannya manusia selalu berhubungan dengan manusia lain guna menyelenggarakan kepentingan-kepentingannya.

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan dari perkawinan adalah: (1) menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, (2) melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, (3) menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan (4) menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri. Maksudnya keduanya saling mempunyai rasa kasih sayang, kasih sayang terhadap anak-anak dan keluarga.¹

Perkawinan di samping merupakan sumber kelahiran dari seorang anak manusia juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara. Dari segi agama, melaksanakan perkawinan merupakan salah satu perintah agama, sehingga sebagai makhluk yang diciptakan ke dunia secara berpasangan maka sudah menjadi kodrat apabila seorang pria dan seorang wanita hidup bersama dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang penting dan bukan hanya merupakan kebutuhan biologis dua insan, tetapi lebih dari itu bahwa dari perkawinan tersebut diharapkan menghasilkan generasi yang sehat lahir batin. Oleh karena itu, perlu campur tangan pemerintah dalam pengaturannya.

Pernikahan adalah tatanan sosial yang populer sejak berabad-abad lampau, bahkan sejak awal kehidupan manusia. Pemikahan merupakan hal yang sakral, bagi umat beragama maupun tidak, dimana pun dan kapan pun. Ikatan pria dan wanita dalam bentuk relasi suami isteri merupakan ikatan janji

¹ Amini. *Kiat Mencari Jodoh*. Jakarta. Lentera Basritama. 1997. hal 3.

kesetiaan cinta-kasih, yang diikrarkan dengan jalan nikah. Jadi nikah merupakan manifestasi ikatan janji di antara pria dan anita, yang memberikan batasan-batasan dan pertanggungjawaban tertentu, baik pada suami maupun pada isteri.²

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama tetapi kemungkinan yang berbeda hanya formalitasnya saja. Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari Negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu berbeda diantara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Perkawinan sering pula diteguhkan dengan upacara perkawinan.³

Suatu perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga hukum, maka pelaksanaan perkawinan merupakan akibat dari suatu perbuatan itu yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatannya.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 3019 maka mulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun sebelum terbentuknya Undang-Undang tersebut, Negara sudah ada beberapa peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan

² Kartono, *Psikologi Wanita Jilid 2*. Jakarta, Mandar Maju, 1999, hal. 20

³ Ramulyo, M. *Tinjauan Beberapa Pasal UU Homor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta, Hiuco. 1998. hal. 8.

⁴ Amini, Op. Cit., hal. 35.

penduduk Indonesia di samping Hukum Islam dan Hukum Adat.

Adapun peraturan perundangan tersebut adalah:

1. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* Stp. 1898 No. 158).
2. Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*Huwelijk Ordonantie Voor Christen Indonesiers Java, Minahasa en Ambonia* Stb. 1933 No. 74 jo 607 LN' 136).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab IV Buku I yaitu tentang orang
4. UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk (LN. 1954 No. 98).

Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* Stb. 1933 No. 74) dan peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* Stb. 1989 No. 158 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila secara tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan PENPRES NO.1 Tahun 1964, di Indonesia hanya diakui lima agama yaitu: Islam, Katholik, Protestan, Hindhu maupun Budha, sesuai dengan ketetapan MPR No. IVIMPR/1978, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.⁵

Setiap agama, baik itu Islam, Katolik, Protestan, Hindhu maupun Budha mempunyai peraturan tentang tata cara perkawinan, syarat-syarat perkawinan atau mengenai larangan perkawinan yang masing-masing agama berbeda-beda. Apabila perkawinan terjadi pada orang yang menganut agama yang sama maka tidak menjadi masalah. Permasalahan terjadi manakala mereka yang berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan dan mereka menyadari akan arti iman, karena adanya cinta yang mendalam ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanan masing-masing.⁵

Di kehidupan modern sekarang ini perkawinan bukan saja berakibat pada individu yang melangsungkan perkawinan tapi juga menimbulkan akibat yang luas bagi pergaulan hidup manusia. Kemajuan komunikasi serta alat transportasi semakin membuka kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk saling mengadakan hubungan, baik antar suku, ras maupun agama. Dari hubungan-hubungan ini tidak mustahil akan terjadi perkawinan antar suku, ras dan agama dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya

⁵ Rasidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung, Remaja Rosdakarya. 1991, hal. 17.

yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.⁶ Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Salah satu permasalahan perkawinan adalah masalah perkawinan beda agama.

Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 memberi pengertian tentang perkawinan campuran atau beda agama yaitu terbatas pada individu yang akan melangsungkan perkawinan tetapi berkewarganegaraan atau agama yang berbeda. Sedangkan mengenai peraturan perkawinan bagi orang yang berbeda agama, Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya.

Suatu perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga hukum, maka pelaksanaan perkawinan merupakan akibat dari suatu perbuatan itu yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasvarakatannva.⁷

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa lembaga perkawinan telah ada sejak kelahiran manusia yang pertama tetapi kemungkinan yang berbeda hanya formalitasnya saja. Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari Negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu berbeda diantara Negara yang satu dengan

⁶ Narsikun. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Jakarta, Bulan Bintang, 2003. Hal. 9.

⁷ Muhdol. A. Z. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung. Al Bavan Press. 1995. hal.35.

Negara yang lain. Perkawinan sering pula diteguhkan dengan upacara perkawinan.⁸

Bagi orang yang berbeda agama tetapi tetap akan melangsungkan perkawinan maka salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah izin dari jawatan yang berwenang untuk memberikan dispensasi kawin. Dalam hal ini adalah pejabat Kantor Urusan Agama pada umumnya tidak akan memberikan dispensasi tersebut karena adanya perbedaan agama pada calon mempelai. Kemudian apabila ke Kantor Catatan Sipil, pejabat Kantor Catatan Sipil pada umumnya akan menyarankan kedua calon mempelai untuk memohon dispensasi kepada Pengadilan Negeri agar Kantor Catatan Sipil dapat mencatat perkawinan tersebut.

Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkembangannya hingga saat ini telah menerima dan memeriksa permohonan untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi mereka yang berbeda agama. Dalam memeriksa permohonan tersebut tentu saja proses atau tahapan dan mendasarkan putusannya pada hukum serta alasan-alasan yang relevan.

Apabila dalam suatu perkawinan beda agama dimana seorang pria islam yang akan melangsungkan pernikahan dengan wanita beragama kristen dapat memberikan pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai. Bahwa ia akan melaksanakan pernikahan di catatan sipil (Pasal 75 NOCI)

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri dapat memberikan ijin kepada seorang pria yang beragama islam dengan seorang

⁸ Raunulyo, M. Op. Cit. Hal. 14.

wanita beragama kristen untuk melangsung pernikahan beda agama tersebut (PP No. 9 tahun 1975)

Perkawinan dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 6 ayat (1) UU Tahun 1974)

Untuk mendapatkan penetapan (ijin) dari Pengadilan Negeri, intinya seorang hakim harus mengetahui secara yakin bahwa seorang pria beragama islam dengan wanita yang bergama kristen tersebut harus melakukan permohonan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan.

Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri barulah perkawinan tersebut dapat dilaksanakan di kantor catatan sipil, dari masalah tersebut mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI ORANG YANG BERBEDA AGAMA”

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan dapat terfokus. Pembatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Di Indonesia ada lima agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Penulis hanya membatasi permasalahan pada pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama, yaitu agama Islam dan Kristen. Alasannya, data tentang perkawinan beda agama antara orang beragama Islam

dan beragama Kristen dapat diperoleh di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga dapat memudahkan peneliti dalam membahas permasalahan mendasari penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan bagi orang yang berbeda agama dan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh pasangan suami isteri yang berbeda agama.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah disusun dalam bentuk suatu kalimat tanya, sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian yang bersifat deskriptif ini guna mengetahui permasalahan yang akan dibahas. Adapun penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan bagi orang yang berbeda agama?
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama sehingga dinyatakan sah secara hukum?
3. Apa akibat hukum yang ditemui antara suami isteri yang telah melakukan perkawinan beda agama tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan. Tujuan dari penelitian akan memudahkan peneliti untuk membahas permasalahan secara fokus sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan bagi orang yang berbeda agama.
2. Ingin mengetahui proses pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama sehingga dinyatakan sah secara hukum
3. Ingin mengetahui akibat hukum yang ditemui antara suami isteri yang telah melakukan perkawinan beda agama tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Memberi sumbangan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan bagi orang yang berbeda agama.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata dalam perkawinan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pelaksanaan pernikahan bagi orang yang berbeda agama sehingga peneliti dapat memanfaatkan teori yang diperoleh saat kuliah dalam pelaksanaan secara nyata. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan syarat untuk meraih gelar kesarjanaan di bidang hukum.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁹ Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu; penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas mengenai metode dan penelitian, dapat diambil kesimpulannya bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Suatu metode penelitian di harapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data di peroleh lengkap, relevan, akurat, dan reliable, diperlukan metode yang tepat yang dapat di andalkan (*dependable*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1997, hal. 11.

¹⁰ *Ibid*

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹¹ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang.

2. Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu:

1) Bahan hukum primer

a) KUH Perdata

b) HIR

c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* Stp. 1898 No. 158).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal. 10.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang pernikahan berbeda agama.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Lembaga Catatan Sipil.

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah:

- a) Hakim yang pernah memutuskan permohonan pernikahan beda agama.
- b) Ketua dan Staf Lembaga Catatan Sipil yang berkompeten untuk menjelaskan tentang proses pernikahan beda agama.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan mengacu pada tiga bahan hukum di atas dengan pokok permasalahan tentang.

Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

1) Interview (wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah hakim yang pernah memutuskan permohonan pernikahan beda agama..

2) Observasi

Pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, peneliti melakukan pengamatan sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan oleh obyek penelitian. Peneliti melakukan catatan-catatan penting sebagai hasil pengamatan untuk data sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

3) Quesinoer

Quesinoer adalah daftar pernyataan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subyek yang akan diteliti berdasarkan jawaban atau lisan, peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek yang diselidiki.¹²

Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan teknik *nonrandom purposive sampling*. *Non random sampling* artinya tidak semua individu dalam penelitian diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.¹³ *Purposive sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴ Teknik *purposive sampling* ini digunakan dengan alasan bahwa ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang dijadikan subjek penelitian dapat menunjang pemerolehan data sesuai dengan judul penelitian.

Pengeterapan pengambilan sampel dengan *purposive sampling* yaitu peneliti menentukan subjek yang dijadikan sumber data. Ada dua sumber dalam penelitian ini, yaitu hakim dan pasangan suami isteri beda agama. Ciri-ciri sampel penelitian, yaitu:

- 1) Hakim yang pernah memberikan penetapan kepada pasangan calon suami isteri yang berbeda agama.

¹² Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Andi Offset. Yogyakarta. 1992. Hal. 18.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian I*, Andi Offset, Yogyakarta, 1998, Hal 21

¹⁴ Azwar Sarifudin, *Metode Penelitian*, Aneka Cipta, Jakarta, 2001, Hal 18

2) Pasangan suami isteri yang beda agama dan terikat dalam perkawinan.

4. Analisa data

Teknik analisis data dalam suatu penelitian penting agar data yang telah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah yang diteliti.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pernikahan beda agama, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan diambil kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam hasil skripsi ini, maka secara umum penulis mengemukakan urutan (sistematika) skripsi seperti di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan
2. Syarat Perkawinan
3. Tujuan Perkawinan
4. Asas-asas Perkawinan
5. Hubungan Suami dengan Isteri dalam Perkawinan
6. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri
7. Tanggung Jawab Suami dan Isteri

B. Tinjauan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Beda Agama
4. Akibat Hukum Bagi Orang yang Melakukan Perkawinan Beda Agama

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian

B. Pembahasan

1. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan pernikahan bagi orang yang berbeda agama
2. Proses pelaksanaan perkawinan bagi orang yang berbeda agama sehingga dinyatakan sah secara hukum
3. Akibat hukum yang ditemui antara suami isteri yang telah melakukan perkawinan beda agama

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN